

ABSTRAK

Suatu kemajuan dari undang-undang tindak pidana korupsi tersebut bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi, salah satu bentuk korporasi adalah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun dalam praktiknya terdapat kendala dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemidanaan terhadap korporasi pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum. Tujuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah mengkaji dan mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini, mengkaji dan mengetahui alasan mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan dan mengkaji dan mengetahui rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan.

Metode penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme yaitu individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil Penelitian berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta paradigma studi konstruktivisme maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan; 2) Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini salah satunya adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK; 3) Rekonstruksi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan rekonstruksi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rekomendasi terdiri dari perlu adanya revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi terkait dengan sanksi pidananya dan adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait sanksi yang diterima oleh korporasi.

Kata kunci : rekonstruksi, pertanggungjawaban, pidana, korporasi, korupsi.

ABSTRACT

An improvement from the criminal act of corruption is that the subject of corruption is not only individuals but also corporations, one form of corporation is in the form of State-Owned Enterprises (BUMN). However, in practice there are obstacles in the effort to recover state financial losses through the criminal prosecution of corrupt corporations both in terms of substance, structure and legal culture. The purpose of the research in writing this dissertation is to examine and know the responsibility of corporate criminal acts in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) in the current criminal act of corruption, examine and find out the reasons why corporate criminal liability in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) in the current criminal acts of corruption not yet based on the value of expediency and justice and reviewing and knowing the reconstruction of corporate criminal liability in the form of a State-Owned Enterprise (BUMN) in corruption acts based on the value of expediency and justice.

The research method in writing this dissertation is to use a constructivist research paradigm, that is, individuals interpret and act according to various conceptual categories that exist in their minds. This type of research is normative legal research, research specification is descriptive analysis. The approach method used in writing this dissertation is normative legal research (juridical normative). Normative Legal Research is a method of legal research conducted by examining mere library materials or secondary data. The material examined in normative legal research is literature or secondary data.

The results of the study are based on qualitative analysis using a normative juridical approach and a constructivism study paradigm, it can be concluded that:

Corporate criminal liability in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) in the current criminal act of corruption in the form of criminal acts of corruption in Indonesia has not been fair; 2) Weaknesses of corporate criminal liability in the form of State-Owned Enterprises (SOEs) in corruption at this time one of which is in the formulation of when corporations commit criminal acts of corruption is not regulated or explained the definition of "work relations" and "other relationships" according to UUPTPK ; 3) Reconstruction of the Corruption Act and reconstruction of the Law on State-Owned Enterprises (BUMN).

The recommendation consists of the need for revision of Law No. 20 of 2001 concerning the eradication of corruption related to criminal sanctions and the revision of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises related to sanctions received by corporations.

Keywords: reconstruction, accountability, criminal, corporate, corruption.